

## Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung Lempake Tahun 2021 Di Kecamatan Biatan Kabupaten Berau

### Factors Influencing Community Participation in the Election of the Village Head in Lempake, 2021, in the Biatan Subdistrict, Berau Regency

Andi Riski Mulia Saputra<sup>1</sup>, Budiman<sup>2</sup>, E.Letizia Dyastari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

#### ARTICLE INFORMATION

Vol. 11, No.04

Page : 142-149

Published : 2023

#### KEYWORDS

*Factors Influencing Community Participation, Village Chief Election*

#### CORRESPONDENCE

Phone: +6281253447969

E-mail: andiriski565@gmail.com

#### A B S T R A C T

This research aims to identify the factors influencing community participation in the election of the Village Head in Lempake in 2021 in the Biatan Subdistrict, Berau Regency. The study was conducted in the Biatan Lempake Village in the Biatan Subdistrict, Berau Regency. The research design used was qualitative descriptive. The research involved several stages, including field research through observation, interviews, and documentation as a supporting element for the study. The qualitative descriptive analysis involved examining the data obtained based on real-life situations and connecting them with theories that support the discussion. This approach allowed for an exploration of the cause-and-effect relationships influencing political participation in the village. The descriptive analysis included data collection, data presentation, data analysis, and, ultimately, drawing conclusions. The indicators in this study were categorized as follows: Due to Stimulus, Due to Individual Characteristics, Due to Social Characteristics, and Due to Situational and Environmental Factors. The research findings demonstrated that stimuli, individual characteristics, social characteristics, and situational/environmental factors influenced community participation in the village head election held in Lempake Village, Biatan Subdistrict, Berau Regency.

#### INTRODUCTION

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk pemerintahan yang demokratis, Tingkat partisipasi pemilih yang rendah merupakan gejala umum dari pilkades banyak daerah, dan fenomena partisipasi yang rendah ini akan terus menjadi hal luar biasa diantara penduduk desa Indonesia dalam pemilihan mendatang. Pengamat dan penyelenggara pemilu seringkali memberikan pendapat tentang penyebab rendahnya partisipasi pemilu, namun penjelasan ini berdasarkan pengamatan, bukan penelitian pemahaman mereka menentukan siapa yang menjalankan demokrasi melalui pemilu (pilkades) tidak dapat dipungkiri bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, dan kita

diperlukan dalam keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini. Partisipasi masyarakat Muncul dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Undang-Undang dan diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi sangat penting karena dalam teori demokrasi orang benar-benar tau yang mereka inginkan. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dilindungi. Partisipasi adalah inti dari demokrasi, sehingga tidak ada akan ada demokrasi tanpa partisipasi warga dalam politik. Partisipasi masyarakat atau keterlibatan politik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Kita melihat ini dalam definisi normatif,

demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Tetapi dalam tindakan yang terjadi di lapangan terutama terlihat di Kampung Lempake, masih banyak beberapa masyarakat yang belum sadar pentingnya sebuah partisipasi dalam pemilu. Berdasarkan observasi data penduduk Biatan Lempake pada tahun 2021 yaitu berjumlah 2471 jiwa sedangkan jumlah data pemilih tetap kepala kampung tahun 2021 sejumlah 1627 sedangkan jumlah pemilih yang memilih dalam pemilihan kepala kampung atau dengan suara sah dengan jumlah 1342 sedangkan suara yang tidak sah berjumlah 26 kita lihat dari data yang telah dikumpulkan masih ada beberapa penduduk masyarakat yang tidak melakukan memilih atau menggunakan hak suaranya dalam memilih sekitar 259 yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala kampung jika dipresentasikan dari pemilih sekitar 84,08% yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala kampung dan yang tidak mengikuti atau yang disebut golongan putih (golput) sekitar 15,91%, jika dibandingkan dengan pemilihan kepala kampung sebelumnya yang berjumlah 1232 dengan pemilih tetap, sedangkan jumlah pemilih kepala kampung atau dengan suara dengan jumlah 1091 kalau dibandingkan dengan presentasi dari pemilihan tersebut sekitar 88,55% yang ikut partisipasi dalam pemilihan kepala kampung dan yang tidak mengikuti atau yang disebut dengan golongan putih (golput) sekitar 11,45% jika dibandingkan presentasi sebelumnya lebih besar dibandingkan dengan pemilihan kepala kampung tahun 2021, berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian tersebut.

## THEORETICAL FRAMEWORK

### Partisipasi

Menurut Kamarulzaman (2005:259) Partisipasi berasal dari kata "*participation*" yang berarti "berpartisipasi", dan Partisipasi berarti ikut serta Dalam konteks tertentu, partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai

keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan yang berskala lebih besar. Penting untuk diingat bahwa partisipasi memiliki makna yang bermakna hanya jika diiringi oleh tanggung jawab dari pihak yang terlibat.

Menurut Weiner (dalam Horison 2007:130), perubahan dalam proses politik yang mencerminkan gerakan partisipasi yang lebih luas dapat dijelaskan melalui faktor-faktor berikut. Pertama, modernisasi yang merambah ke berbagai bidang kehidupan mendorong peningkatan tuntutan partisipasi politik dari berbagai individu. Kedua, perubahan dalam struktur kelas sosial juga turut berperan signifikan. Pentingnya pertanyaan tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik menjadi semakin nyata seiring dengan perubahan pola partisipasi politik, pengaruh kaum intelektual, perkembangan komunikasi bahasa modern, dan masuknya ide-ide demokrasi ke dalam proses partisipasi.

### Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan istilah umum dalam ilmu politik, dan meskipun terdapat variasi dalam definisi terminologi, kebanyakan ilmuwan politik sepakat bahwa partisipasi politik mencakup berbagai aspek berikut:

- a. Partisipasi politik mencakup tindakan dan sikap, serta faktor subjektif seperti orientasi politik, pengetahuan politik, kepentingan dalam politik, persepsi politik, dan persepsi efektivitas atau relevansi politik yang tidak dapat diukur secara langsung. Sikap dan perasaan politik hanya dapat diamati melalui perilaku politik dan terpisah dari tindakan politik itu sendiri.
- b. Masalah partisipasi politik ditujukan kepada individu sebagai warga negara, bukan kepada profesional politisi seperti pejabat pemerintah, pejabat partai politik, kandidat, atau pelobi profesional. Partisipasi politik oleh individu ini sering kali bersifat sporadis

atau sebagai kegiatan sampingan, tidak sebanyak peran sosial lainnya.

- c. Kegiatan partisipasi politik mencakup tindakan yang memiliki dampak pada pengambilan keputusan pemerintah, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan politik. Tujuannya bisa beragam, termasuk merubah keputusan, mempertahankan status quo, atau mempengaruhi sistem politik dan aturan main politik.
- d. Partisipasi politik dapat mencakup kegiatan yang mempengaruhi pemerintahan, tanpa memandang apakah tindakan tersebut berhasil atau gagal.
- e. Partisipasi politik dapat dibagi menjadi partisipasi otonom, yaitu aktivitas politik sukarela, dan partisipasi dalam mobilisasi, yang didorong oleh orang lain.

Menurut Mariam Budiardjo (2008), Partisipasi politik, partisipasi aktif individu atau kelompok orang dalam kehidupan politik, termasuk memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan tersebut meliputi pemungutan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menghubungi atau melobi pejabat, anggota pemerintahan, dan menjadi anggota partai politik atau kelompok sosial melalui tindakan langsung. Sebagaimana Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, proses pemilu merupakan proses yang sangat rentan terjadinya perselisihan antar elit politik bahkan antar kebijakan moneter atau politik uang.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Dua faktor kunci yang mempengaruhi partisipasi politik individu melibatkan hak dan kewajiban dalam berbagai konteks. Hak-hak politik, ekonomi, perlindungan hukum, jaminan sosial, dan kewajiban dalam sistem politik serta kehidupan sosial adalah variabel yang signifikan

dalam memahami tingkat partisipasi politik seseorang.

Hak-hak seperti hak politik dan ekonomi memberikan dasar bagi keterlibatan individu dalam proses politik, sementara perlindungan hukum dan jaminan sosial dapat memainkan peran penting dalam membentuk keinginan seseorang untuk aktif berpartisipasi. Di sisi lain, kewajiban, baik dalam konteks sistem politik maupun kehidupan sosial, juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik individu. Dengan demikian, pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam berbagai dimensi dapat memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika partisipasi politik seseorang.

Penyebab partisipasi politik dapat dijelaskan melalui lima faktor, yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Modernisasi di berbagai aspek kehidupan mendorong tuntutan kekuatan politik kolektif dari sejumlah besar orang.
- b. Perubahan dalam komposisi masyarakat mengubah dinamika partisipasi politik, dari pertanyaan tentang siapa yang berhak berpartisipasi dan mengambil keputusan menjadi elemen krusial dalam mengubah pola partisipasi.
- c. Perkembangan komunikasi modern yang dipimpin oleh kaum intelektual memainkan peran dalam penyebaran gagasan demokrasi partisipatif ke negara-negara yang baru muncul sebelum era modernisasi dan industrialisasi yang matang.
- d. Konflik antara kelompok pemimpin politik menciptakan kebutuhan untuk dukungan warga. Perjuangan antar kelas, seperti perlawanan kelas pekerja terhadap kaum bangsawan, dapat membentuk dasar untuk perluasan hak pilih universal.
- e. Keterlibatan pemerintah secara menyeluruh dalam urusan sosial, ekonomi, dan budaya menciptakan tuntutan sistematis terhadap peluang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik ketika ruang lingkup pemerintahan berkembang.

## Kepala Kampung

Menurut Hanif Nurcholis (2011:1), desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor No. 6 tahun 2014 tentang desa. Desa ialah desa, Desa tata cara atau yg diklaim menggunakan nama lain, yang selanjutnya diklaim yaitu kampung, merupakan kesatuan rakyat aturan yang mempunyai batas daerah yang berwenang buat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa rakyat, hak dan asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sebuah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan sebuah Undang-undang No, 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Berdasarkan sebuah Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa ialah penyelenggaraan sebuah urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sebuah sistem pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 39 dinyatakan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) masa jabatan. Kepala desa juga memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan desa yang disetujui oleh BPD. Kepemimpinan kepala desa adalah kepemimpinan formal yang terikat pada suatu jabatan dalam struktur pemerintahan desa. Kepala desa adalah kepala pemerintahan tingkat terendah dalam hubungan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan pemerintah baik pemerintah pusat maupun tingkat I dan tingkat II atau berdasarkan peraturan resmi dari peraturan pemerintah.

## Pemilihan Kepala Kampung

Pemilihan Kepala Desa dapat diatur dalam sebuah Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014, yang diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi: (1) Kades dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang dapat memenuhi syarat, (2) Pemilihan kepala desa dilakukan

secara langsung, bebas, terbuka, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam melaksanakan proses pilkades Kabupaten Berau terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) dengan huruf (a,b,c,d) peraturan daerah kabupaten Berau tentang pemilihan kepala kampung diselenggarakan melalui empat tahapan, yaitu: 1) Tahapan persiapan, 2) Tahapan pencalonan, 3) Tahapan pemungutan suara, dan 4) Tahapan Pencalonan. Umum yang terlibat dalam sebuah aktivitas politik. Yang tujuan utamanya dari kegiatan politik tersebut ialah untuk mempengaruhi suatu proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. (Sitepu, 2012:92).

## METHOD

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2003:10) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau penghubung dengan variabel lain. Berikut fokus Penelitian yang akan digunakan :

- a. Adanya Pendorong
- b. Karakteristik Status Sosial
- c. Karakter Sosial (Keadaan Sosial) Seseorang
- d. Situasi atau lingkungan politik

## RESULT AND DISCUSSION

### Adanya Pendorong

Perangsang politik yang dimaksud adalah dengan adanya upaya-upaya dari berbagai pihak baik itu dari pihak pemerintahan Kecamatan Biatan Lempake maupun dari pihak pendukung untuk menarik partisipasi masyarakat Kecamatan dalam keikutsertaannya di dalam pemilihan Kepala Kampung Biatan Lempake Tahun 2021. Adanya perangsang yaitu meliputi prefensi masyarakat dalam berpolitik dipengaruhi oleh bantuan-bantuan materi dari pihak-pihak tertentu, dengan money politic, dan dengan bentuk-bentuk pemberian lainnya dan berupa sosialisasi dan kampanye.

Faktor pendorong yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik warga Kampung Biatan Lempake dalam pemilihan kepala kampung adalah keterlibatan tim sukses yang mendukung setiap calon kepala kampung. Dalam setiap pemilihan kepala kampung di kampung tersebut, setiap calon memiliki tim sukses yang memainkan peran penting dalam membantu calon tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan suatu calon kepala kampung tidak dapat menghadapi proses sosialisasi pencalonan dan visi-misi mereka sendirian. Oleh karena itu, mereka memilih individu yang memiliki pengaruh di wilayah tempat tinggal mereka untuk menjadi bagian dari tim sukses mereka. Pentingnya tim sukses ini dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Biatan Lempake tidak bisa diabaikan.

Tim sukses ini memiliki peran penting dalam memperoleh suara dari masyarakat untuk calon yang mereka dukung. Masyarakat memberikan simpati kepada tim sukses dan calon yang diusungnya, terutama jika individu yang dipilih sebagai tim sukses memiliki pengaruh di wilayah tersebut. Selain individu yang ditunjuk oleh calon kepala kampung, ada juga yang secara sukarela menjadi bagian dari tim sukses salah satu calon. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan kepada calon kepala kampung.

Partisipasi sukarela masyarakat dalam tim sukses juga dipengaruhi oleh track record calon yang mereka dukung. Masyarakat yang menjadi bagian dari tim sukses biasanya memiliki akses kepada informasi dan minat terhadap calon yang mereka dukung. Motivasi mereka adalah untuk membantu masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan tentang semua calon yang berkompetisi dalam pemilihan kepala kampung. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat saat pemilihan kepala kampung, dengan memilih calon yang dianggap terbaik.

Selain itu, kehadiran tim sukses juga dapat mempengaruhi masyarakat dan membuat

mereka cenderung mengikuti panduan dari tokoh masyarakat yang menjadi bagian dari tim sukses. Ini berarti bahwa kehadiran tokoh masyarakat dalam tim sukses dapat mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap calon kepala kampung yang didukung oleh tokoh tersebut. Dengan demikian, tim sukses memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi partisipasi politik dan pilihan pemilih dalam pemilihan kepala kampung. Kampung.

### **Karakteristik Status Sosial**

Karakteristik seseorang yang dimaksud adalah mengenai sifat dan kepribadian yang dimiliki setiap calon serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada masing-masing calon. Karakteristik seseorang tersebut dipengaruhi umur dan jenis kelamin serta faktor yang ada dalam diri masing-masing calon Kepala

Kampung maupun faktor luar yang berpengaruh terhadap masyarakat Kecamatan Biatan Lempake pada khususnya.

Karakteristik pribadi calon kepala kampung memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi respons dan tanggapan masyarakat. Setelah masyarakat mengetahui siapa calon-calon yang berkompetisi dalam pemilihan kepala kampung, mereka segera mencari informasi lebih lanjut tentang para calon tersebut. Mereka mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk percakapan di masyarakat dan tim sukses calon kepala kampung. Respons masyarakat terhadap calon kepala kampung dapat memunculkan rasa simpati atau ketidaksetujuan terhadap mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung. Jika calon dipandang baik oleh masyarakat, kemungkinan besar masyarakat akan bersedia berpartisipasi dalam pemilihan. Namun, jika calon dipandang buruk, maka partisipasi masyarakat cenderung rendah. Rekam jejak calon juga memiliki pengaruh serupa; jika calon memiliki rekam jejak yang positif, masyarakat lebih mungkin untuk

berpartisipasi, tetapi jika rekam jejaknya negatif, partisipasi masyarakat kemungkinan akan berkurang. Kinerja pemerintah desa juga dinilai oleh masyarakat, karena pemerintah desa merupakan entitas pemerintahan yang paling dekat dengan mereka. Penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah desa dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap kepala kampung. Jika masyarakat menganggap kinerja aparat pemerintah desa baik, hal ini dapat mencerminkan positif pada pemimpin kepala kampung. Sebaliknya, jika masyarakat merasa kinerja aparatnya buruk, hal tersebut bisa menciptakan pandangan negatif terhadap kepala kampung. Apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dapat tercermin dalam partisipasi mereka dalam pemilihan kepala kampung. Kesimpulan dan penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah desa dapat menjadi salah satu faktor yang memotivasi atau menghambat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala kampung.

#### **Karakter Sosial (Keadaan Sosial) Seseorang**

Calon kepala kampung dianggap memiliki status sosial yang baik jika mereka tidak memiliki konflik atau masalah dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap calon cenderung meningkat jika calon dianggap baik oleh berbagai kalangan. Calon yang tidak memiliki riwayat kriminal, seperti mencuri atau berkelahi, dinilai memiliki status sosial yang baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas calon. Kegiatan dermawan dan sosial calon, seperti memberi sumbangan, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan bakti sosial, dipandang positif oleh masyarakat. Calon yang terlibat dalam kegiatan ini mendapatkan dukungan lebih. Calon yang terlibat dalam kegiatan memberi donasi, memberi santunan kepada anak yatim, dan membantu masyarakat yang mengalami musibah dinilai memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Hal ini menciptakan persepsi positif terhadap calon.

Pendapat masyarakat tentang calon dapat bervariasi, tetapi dalam kasus yang diwawancarai, beberapa pihak, termasuk Ketua Komisi II DPRD dan Ketua RT 01, memberikan penilaian positif terhadap status sosial dan perilaku calon.

Status sosial calon diukur tidak hanya dari aspek tidak memiliki konflik atau riwayat kriminal, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan bantuan. Terdapat indikasi bahwa pemahaman politik dan dukungan masyarakat lebih mungkin diberikan kepada calon yang memiliki ekonomi tinggi. Calon yang dermawan dan terlibat dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan pemahaman politik dan dukungan mereka.

#### **Situasi atau lingkungan politik**

Situasi dan lingkungan politik di Kampung Biatan Lempake dapat dianggap kondusif dalam konteks pemilihan kepala kampung. Masyarakat aktif terlibat dalam seluruh tahap pemilihan, mulai dari memantau perkembangan calon kepala kampung hingga menentukan pemenang. Secara umum, masyarakat terlihat sangat antusias dan sering membahas pemilihan kepala kampung dalam percakapan sehari-hari. Mereka cenderung membandingkan calon untuk membuat keputusan yang lebih baik pada hari pemilihan.

Motivasi utama masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala kampung adalah keinginan untuk memilih calon yang dianggap terbaik sesuai dengan visi dan misi yang mereka yakini. Masyarakat berusaha mencari informasi tentang calon-calon yang bersaing untuk membuat keputusan yang lebih informan saat pemilihan. Mereka mengikuti setiap tahapan pemilihan dengan harapan dapat memilih pemimpin yang akan bekerja sungguh-sungguh, amanah, dan terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan aspirasi dan cita-cita mereka tanpa memandang perbedaan golongan, agama, atau ras.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan kepala kampung mencerminkan situasi dan lingkungan politik yang kondusif di lingkungan mereka. Situasi yang kondusif mendorong minat politik masyarakat, sementara situasi yang tidak kondusif dapat mengurangi partisipasi politik mereka. Keikutsertaan masyarakat dalam seluruh proses pemilihan kepala kampung adalah hasil dari keinginan mereka untuk memiliki pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan mampu memajukan komunitas mereka baik dari segi fisik maupun non-fisik. Ini mencerminkan dorongan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran secara merata, terlepas dari faktor-faktor seperti golongan, agama, atau ras.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa hal yang bisa diuraikan menjadi beberapa kesimpulan. Kesimpulan penelitian tersebut berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan diantaranya Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau dan Kelurahan Lempake, dan masyarakat Kampung Biatan Lempake bahwa :

1. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Biatan Lempake pada tahun 2021 rendah karena kurangnya rangsangan politik. Sosialisasi dan dorongan untuk berpartisipasi dalam pemilihan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih aktif.
2. Figur atau calon kepala kampung yang memiliki karakter baik dan telah membuktikan diri sebelumnya cenderung mendapatkan dukungan masyarakat. Kepercayaan masyarakat pada pemimpin sebelumnya memainkan peran penting dalam pemilihan kepala kampung.
3. Kesadaran politik masyarakat berperan dalam tingkat partisipasi. Masyarakat mengharapkan janji politik dari calon kepala kampung dan menganggap hal ini penting.

Namun, masih ada kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat.

4. Kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi politik dan perlunya memberikan suara mereka tidak sepenuhnya terkait dengan latar belakang pendidikan calon. Masyarakat lebih cenderung memilih pemimpin yang amanah dan tidak hanya berjanji.

## REFERENSI

### Books:

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, Budiono, Bambang. 2000. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Jogjakarta: Renika.

Kamarulzaman, AKA. 2005. *Kamus Ilmiah Serapan*. Yogyakarta. Absolut.

Milbart, Lester, W., *partisipasi politik*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

### Jurnal:

Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157-190.

Herman, H. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 75-98.

Idris, D. R., Argenti, G., & Adiarsa, S. R. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Jayakarta Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Karawang Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(8), 68-79.

Magai, A., Mamentu, M., & Potabuga, J. (2022). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi

Kasus di Desa Amole Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika). *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(2).

Mahardika, S. (2017). Implementasi Kebijakan Electronic Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Politic and Government Studies*, 6(2), 52-54.

Muhammad, S. (2022). Peran Pemerintah Desa Mantar Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa Tahun 2019 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

**Dokumen:**

Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during professional rugby league skills training. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 13 (6), 578-583.

**Serial/journal article (online database, such as Ebsco):**

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang kemudian diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 39 dinyatakan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa yang diatur dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2